

RINGKASAN

Desi Siswati. 2020. Evaluasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi Lapak Tali Tantri Di Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu, Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si dan Pembimbing II : Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Dringu menindaklanjuti peraturan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Camat Dringu Nomor 470/22/426.419/2019 Tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Dringu. Lapak Tali Tantri Merupakan Kepanjangan dari Layanan Cepat Administrasi Kecamatan Tanpa Pungli Tanpa Antri yang dimana Layanan ini berbasis online jadi masyarakat hanya perlu datang ke kantor Desa tidak perlu datang ke Kantor kecamatan dan berkas pelayanan selesai dalam 10 menit dan dapat disahkan secara digital.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (Studi Lapak Tali Tantri Di Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu) serta Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Layanan Lapak Tali Tantri tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Sanafiah Faisal yang terdiri dari reduksi data, pengumpulan data, penggambaran kesimpulan dan display data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (Studi Lapak Tali Tantri Di Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu) sudah cukup baik dalam evaluasi kebijakan ini menggunakan 4 (empat) criteria evaluasi kebijakan yaitu, Input, Proses, Output, Outcome

SUMMARY

Desi Siswati. 2020. Evaluasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja (Studi Pada Inovasi Lapak Tali Tantri Di Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu, Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si and Pembimbing II : Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP

Based on Probolinggo Regent Regulation Number 85 Year 2016 Regarding Position, Organizational Structure, Duties and Functions As well as Work Procedures for Subdistrict, Dringu Subdistrict, follow up on the regulation by issuing Dringu Subdistrict Decree Number 470/22 / 426,419 / 2019 Concerning Standard Operational Procedure (SOP) for Administrative Services At the Dringu District Office. Tantri Cord Stalls Are Stands for the Rapid Administration of Subdistrictless without Queue Administration Services where the service is based online so the community only needs to come to the village office and does not need to come to the sub-district office and the service file is completed in 10 minutes and can be validated digitally.

The purpose of this study is to describe and analyze the Evaluation of Regent Regulation Number 85 Year 2016 Regarding Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures (Study of Tantri Rope Stalls in Kedungdalem Village, Dringu Subdistrict) and Supporting Factors and Obstacles to Tantri Stall Service.

This research uses descriptive research method with a qualitative approach. Data collection in this study was through interviews, observation and documentation. While the analysis of the data used is the analysis of data according to Sanafiah Faisal which consists of data reduction, data collection, depictions of flats and display data.

The results of this study can be concluded that the Evaluation of Regent Regulation Number 85 Year 2016 Regarding Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures (Study of Tantri Cord Stalls in Kedungdalem Village, Dringu Subdistrict) is quite good in evaluating this policy using 4 (four) evaluation criteria namely policy, Input, Process, Output, Outcome.